

ABSTRAKSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UPAH MINIMUM KABUPATEN PADA SEKTOR INDUSTRI KECIL DI KABUPATEN DEMAK (Studi Kasus di Kecamatan Mranggen)

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus diawali dengan usaha pemenuhan kebutuhan pokok minimal masyarakat. Penelitian ini memfokuskan pada kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan buruh sektor industri kecil. Kebijakan tersebut yaitu penetapan sistem pengupahan dan implementasinya pada golongan buruh sektor industri kecil. Pemilihan onjek penelitian pada buruh industri kecil ini didasarkan pada asumsi bahwa golongan buruh sektor industri ini yang kesejahteraannya masih memprihatinkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengkaji bagaimanakah implementasi kebijakan penetapan upah minimum kabupaten pada sektor industri kecil di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ? dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektifitas kebijakan upah minimum kabupaten pada sektor industri kecil di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus penelitian berada di Kecamatan Mranggen dengan mendiskripsikan proses implementasi kebijakan upah minimum kabupaten pada sektor industri kecil di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara *indepth interview*, yaitu melalui wawancara langsung dan wawancara tidak langsung, observasi, dan telaah dokumen. Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisa untuk diambil kesimpulannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan upah minimum kabupaten di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak belum berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan karena masih terbatasnya modal yang dimiliki pengusaha sehingga mereka belum bisa memberi upah sesuai dengan standar upah minimum kabupaten. Banyak pengusaha sektor industri kecil yang tidak melaksanakan kebijakan tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi didapatkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan UMK seperti transmisi, kejelasan, dan konsistensi di Kecamatan Mranggen masih belum efektif. Sikap pelaksana kebijakan dalam hal ini dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak dan para pengusaha dilihat dari indikator kognisi, macam tanggapan, dan intensitas tanggapan masih belum berjalan sesuai tujuan. Kondisi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya ekonomi dari para pelaksana kebijakan masih terbatas. Ketiga faktor tersebut menyebabkan implementasi kebijakan upah minimum kabupaten pada sector industri kecil di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak belum terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Saran yang diberikan adalah perlu adanya koordinasi yang baik antara pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pengusaha industri kecil, dan para buruh serta perlu adanya konsistensi dan kejelasan dalam penyampaian informasi mengenai implementasi kebijakan upah minimum kabupaten pada sektor industri kecil supaya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai.

Keyword : kebijakan, upah minimum kabupaten, industri kecil

Disetujui oleh Pembimbing I
Semarang, Desember 2009

Dra. Maesaroh, M.Si
NIP. 19661222.199303.2.001